



## **KERJASAMA INDONESIA, MALAYSIA DAN SINGAPURA DI SELAT MALAKA DALAM MENANGANI PERAMPOKAN BERSENJATA TAHUN 2004-2013**

Avita Nariyanti Putri

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

Indonesia, Malaysia and Singapore formed cooperation to handle armed robbery in Malacca Strait in 2004 named Malsindo. The type of this research is analytic descriptive using qualitative method to apply neoliberalism theory. This research is aimed to know the reason measures to combat armed robbery cases in Malacca Strait between 2004-2013. The result of this research finds that 11 September 2001 in United States had triggered fear among coastal states about the potential attack to merchant ships in Malacca Strait, thus caused Malsindo Cooperation had just formalized in 2004. This research also finds that measures taken by parts states to combat armed robbery consists of Malacca Strait Sea Patrol (MSP) which was launched in 2004, Eyes in The Sky (EIS) which was launched in 2005 and MSP-IS in 2006.

**Keywords:** *armed robbery, Strait of Malacca, Cooperation Malsindo, coordinated patrol*

### **PENDAHULUAN**

Selat Malaka merupakan Selat penting di Asia Tenggara karena jalur pelayaran internasional yang dapat menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik. Selat Malaka memiliki panjang sekitar 900 mil dengan lebar rata-rata 8,3 mil laut (Meganingratna, 2012: 14) dan merupakan jalur terpendek sehingga dapat menyingkat waktu dan biaya pengiriman ke negara tujuan. Alasan inilah yang kemudian membuat negara memilih jalur Selat Malaka sebagai jalur strategis perdagangan internasional.

Posisi Selat Malaka yang strategis mengakibatkan munculnya ancaman perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka sehingga menjadi kekhawatiran bagi negara pantai dan negara pengguna Selat karena dapat mengganggu kegiatan perdagangan negara pada jalur Selat Malaka.

Ancaman perampokan bersenjata di Selat Malaka dikhawatirkan akan bertambah seiring dengan peningkatan jumlah kapal dagang yang melintas setiap tahunnya. Modus operandi yang dilakukan hampir seluruhnya meminta uang tebusan kepada pemilik kapal dengan cara melakukan penyanderaan dan penculikan terhadap kaptain dan awak kapal.

Perampokan bersenjata di Selat Malaka memang sering terjadi namun kurang mendapat perhatian pengamanan yang serius dari negara-negara di sekitar Selat Malaka seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura. Akibatnya pengamanan yang dilakukan berjalan lambat dan para perampok bersenjata tetap saja masih menjadi ancaman bagi para pengguna jalur Selat Malaka.

Kondisi ini berubah sejak peristiwa runtuhnya *World Trade Center* (WTC) pada 11 September 2001 di Amerika Serikat yang membawa perubahan cepat bagi negara-negara di dunia karena menjadi awal munculnya tantangan baru mengenai keamanan. Bagi kawasan Asia Tenggara, peristiwa 11 September 2001 memunculkan masalah keamanan yang lebih

serius karena sebelumnya masalah keamanan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara hanya perampokan bersenjata.

Persoalan perampokan bersenjata kemudian menjadi lebih serius karena di wilayah Selat Malaka mulai muncul perkembangan strategi militer dari negara-negara besar. Ditambah lagi dengan jumlah penyerangan dari perampokan bersenjata hampir 50% dari jumlah keseluruhan yang terjadi di seluruh dunia. (Meganingratna, 2012: 7)

Hal inilah yang kemudian dianggap penting oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk menjaga keamanan wilayah Selat Malaka karena dikhawatirkan perampokan bersenjata akan menyerang kapal-kapal dagang yang akan lewat di Selat Malaka. Oleh karena itu, kerjasama dibutuhkan untuk mengkoordinasikan upaya pengamanan sebagai langkah menghadapi ancaman perampokan bersenjata di wilayah Selat Malaka.

Pembentukan kerjasama baru yang menggabungkan Indonesia, Malaysia dan Singapura dengan tujuan membuat Selat Malaka lebih aman dari ancaman perampokan bersenjata yang secara resmi pada Juli 2004 di Batam dengan nama Malsindo (Malaysia, Indonesia dan Singapura).

Dari latar belakang tersebut, kemudian muncul pertanyaan “Apa saja upaya yang dilakukan oleh Malsindo dalam menangani perampokan bersenjata di Selat Malaka?”. Pertanyaan ini penting untuk mengetahui bagaimana upaya kerjasama Malsindo terhadap perampokan bersenjata di Selat Malaka.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan teori neoliberalism yang lebih fokus memandang kerjasama internasional. Steven L. Lamy (1994) memiliki beberapa pendapat tentang asumsi dasar kaum Neoliberalisme dalam memandang kerjasama internasional, di antaranya: **pertama**, negara adalah aktor yang merupakan salah satu kunci dalam hubungan internasional namun aktor non negara juga ada, Neoliberalisme berpandangan bahwa negara adalah aktor rasional atau aktor instrumen sehingga dalam lingkungan yang kompetitif Neoliberalisme melihat negara harus mampu memaksimalkan kewenangan melalui kerjasama; **kedua**, kerjasama tetap menjadi modal utama; **ketiga**, terjadinya kecurangan dalam kerjasama merupakan salah satu hambatan yang bisa saja terjadi saat aktor saling bekerja sama satu sama lain; **keempat**, Neoliberalisme mengutamakan adanya kerjasama antar aktor dalam hubungan internasional. Namun tidak mungkin jika kerjasama dapat menimbulkan permasalahan karena negara memberikan loyalitas dan sumber dayanya kepada institusi jika dan hanya jika institusi memberikan keuntungan mutualisme dan menyediakan tempat yang lebih untuk mempertahankan kepentingan internasionalnya. (Lamy, 2001:194).

## PEMBAHASAN

Bagi Indonesia, Awalnya perampokan bersenjata yang terjadi di Selat Malaka bukan dipandang sebagai prioritas utama bagi Indonesia karena masalah yang cenderung lebih sering menjadi topik berita baik dalam media cetak maupun televisi adalah masalah korupsi yang memang sering diberitakan dengan berbagai macam kasus. Meskipun demikian menurut data dari International Maritime Bureau perampokan bersenjata terjadi di perairan Indonesia lebih banyak jika dibandingkan dengan yang terjadi di Selat Malaka.

Namun, kondisi ini berubah sejak peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat yang menghancurkan gedung kembar dan peristiwa Bom Bali pada Oktober 2002. Sejak saat itulah Indonesia mulai memberikan perhatian lebih terhadap penanganan berbagai permasalahan di perairan Selat Malaka termasuk perampokan bersenjata.

Bagi Malaysia, pandangan Pemerintah Malaysia terhadap arti penting Selat Malaka menjadikan Pemerintah Malaysia mulai fokus terhadap keselamatan kapal-kapal yang melewati Selat Malaka dengan mengacu pada *Transit Passage Regime*<sup>1</sup> yang sudah diatur dalam UNCLOS 1982. (www.mima.gov.my. diakses 14/03/2016)

---

<sup>1</sup>*Transit Passage Regime* merupakan sebuah aturan yang mengatur tentang hak lintas transit bagi kapal-kapal yang akan melewati Selat Malaka. Hak Lintas transit adalah hak untuk melaksanakan Pelayaran dan penerbangan

Sejak peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat, Malaysia akhirnya memutuskan untuk menjaga keamanan Selat Malaka yang dikhawatirkan pada saat itu akan menyerang kapal-kapal yang akan melewati Selat Malaka. Malaysia berencana untuk bergabung dalam kerjasama Malsindo bersama dengan Indonesia dan Singapura dalam mengamankan Selat Malaka.

Bagi Singapura, sebagai negara yang kecil dibandingkan dengan negara tetangganya yaitu Indonesia dan Malaysia sangat rentan terhadap ancaman keamanan sehingga hal inilah yang mempengaruhi sikap dari para pemimpin Singapura dalam mengambil keputusan termasuk dalam memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain untuk memperkuat kekuatannya dalam menjaga wilayahnya.

Keputusannya dalam bergabung dengan kerjasama Malsindo yang dapat diketahui sebagai wujud perlindungan wilayahnya dari ancaman atau serangan perampok bersenjata di wilayah Selat Malaka. Tepatnya sejak peristiwa 11 September 2001, Pemerintah Singapura mulai fokus dan memilih untuk bergabung dalam Kerjasama Malsindo.

Peristiwa 11 September 2001 telah menyadarkan masyarakat internasional mengenai ancaman keamanan yang kapan dan di mana saja bisa terjadi. Serangan kelompok Al Qaeda nyata-nyata mampu menembus pertahanan dan keamanan negara besar seperti Amerika Serikat. Ini menjadi awal mula negara-negara di dunia fokus terhadap keamanan negaranya.

Sejak peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat pengamanan di Selat Malaka akhirnya mulai serius dilakukan oleh ketiga negara karena dikhawatirkan pada saat itu akan menyerang kapal-kapal yang akan melewati Selat Malaka. Sejak saat itu Indonesia, Malaysia dan Singapura mulai lebih sering melakukan pertemuan untuk membahas pengamanan Selat Malaka sampai akhirnya sepakat pada tahun 2004 dibentuk kerjasama Malsindo.

Program kerja dari Kerjasama Malsindo tahun 2004-2013 di antaranya adalah:

**Malacca Strait Sea Patrol (MSSP)**, MSSP diluncurkan pada 20 Juli 2004 dan dalam pelaksanaan patrolinya, negara Indonesia, Malaysia dan Singapura melakukan patroli terkoordinasi dengan saling memfasilitasi berbagi informasi antara kapal dan Monitoring and Action Agency (MAA). ([www.mindef.gov.sg/](http://www.mindef.gov.sg/) diakses 28/5/2015)

MSSP merupakan perluasan patroli angkatan laut dari MALINDO (Malaysia-Indonesia) yang pada awalnya dilakukan pada bulan Juni 2001. Dalam pelaksanaan patrolinya, melibatkan tujuh belas kapal perang yang terdiri dari tujuh kapal Indonesia, lima kapal Malaysia dan lima kapal dari Singapura. Namun untuk menghormati kedaulatan masing-masing negara, patroli hanya dilakukan di perairan masing-masing negara.

Ketiga negara yang beroperasi sebagai patroli Malsindo dengan tujuan untuk lebih memanfaatkan sumber daya mereka guna memerangi perampokan bersenjata yang terjadi sepanjang tahun. Tiga negara ini menempatkan tiga titik kontrol yang telah didirikan di Belawan dan Batam yang berlokasi di Indonesia, Lumut yang berlokasi di Malaysia dan Changi yang berlokasi di Singapura.

**Eyes In The Sky (EIS)**, pertama kali diungkapkan pada pertemuan dialog Shangri-La di Singapura pada bulan Juni 2005. Terdapat usulan dari Pihak Malaysia yang diwakili oleh Perdana Menteri Malaysia untuk menambah patroli terkoordinasi di bagian udara yang kemudian disebut dengan nama EIS (<http://www.mindef.gov.sg/> diakses 15/1/2016).

Meningkatkan Operasi Malsindo, Indonesia, Malaysia dan Singapura sepakat untuk menambah EIS sebagai upaya tambahan untuk menjaga keamanan wilayah Selat Malaka dari perampokan bersenjata, sementara Thailand ikut patroli udara di Januari 2009. EIS bisa membantu penjagaan wilayah Selat Malaka melalui pantauan udara agar lebih cepat diketahui segala macam bentuk tindakan pelanggaran hukum di wilayah Selat Malaka, khususnya perampokan bersenjata.

---

melalui Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional semata-mata untuk tujuan transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas atau ZEE dengan bagian laut lepas atau ZEE lainnya.

Peresmian ini menjadi awal mula patroli udara dilakukan di Selat Malaka untuk melakukan pantauan wilayah jelajahnya dari udara agar lebih cepat terkait dengan pengejaran dan penangkapan para perampok bersenjata. Dalam pelaksanaan EIS masing-masing negara pesisir Selat Malaka akan menyediakan dua pesawat patroli maritim untuk melakukan patroli di perairan Selat Malaka setiap minggu dan mereka tidak akan diizinkan untuk mendarat dan tetapi mereka diizinkan untuk terbang tidak lebih dekat dari tiga mil laut dari tanah negara yang berpartisipasi.

**MSP Intelligence Exchange Group**(MSP-IS) dibentuk pada tahun 2006 oleh Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand sebagai salah satu upaya untuk mendukung patroli laut dan udara melalui Patroli Sistem Informasi Selat Malaka yang digunakan dengan mengoptimalkan aset udara dan laut di tempat kejadian untuk menyampaikan informasi dari insiden yang sedang berlangsung dan untuk semua pemantauan yang dilakukan setiap waktu.

Empat negara telah mengembangkan sistem informasi Malaka Selat patroli atau (MSP-IS) untuk membantu mereka dalam melakukan patroli. MSP-IS adalah sistem berbagi data yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi tentang pengiriman dan kapal yang menarik untuk meningkatkan keamanan di selat Malaka dan Singapura. Sistem ini termasuk *database* referensi lebih dari 150.000 kapal dan mampu untuk menandai perubahan seperti kapal dengan identitas palsu, juga memungkinkan informasi dari sebuah insiden yang akan disebarkan dengan cepat ke lembaga di empat negara pantai sehingga respon yang terkoordinasi dapat segera ditindak lanjuti.

Dalam melakukan ketiga program kerja Malsindo, ketiga negara memiliki wadah yang digunakan oleh Indonesia, Malaysia, Singapura dan juga Thailand untuk pertemuan antar kepala masing-masing negara untuk membahas dan menentukan kebijakan yang diambil terkait dengan pengamanan di Selat Malaka yang disebut *Joint Coordinating Committee* (JCC). Indonesia Malaysia, Singapura dan Thailand juga menandatangani kesepakatan JCC.

JCC diketuai oleh kepala masing-masing operasi angkatan laut yang dimana sebagai badan pembuat keputusan di MSP. JCC menjadi penyedia saluran komunikasi antara pejabat tinggi dari empat negara yang berpartisipasi dalam pertukaran intelijen dan koordinasi untuk semua langkah-langkah keamanan operasional yang berhubungan dengan Selat Malaka dan Singapura. JCC adalah kelompok pertukaran intelijen (IEG) dibentuk pada tahun 2006, yang terdiri dari badan-badan intelijen angkatan laut dari negara-negara peserta. IEG bertemu secara teratur untuk bertukar informasi dan setiap kejadian di daerah operasi MSP dipelajari dengan hati-hati oleh berbagai badan intelijen. Observasi tersebut nantinya dibagi dan dibahas selama pertemuan untuk rekomendasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan patroli laut dan udara di masa depan.

Mayor Laut Arif Priwadi mengatakan bahwa kasus perampokan bersenjata yang terjadi di Selat Malaka sampai tahun 2013 sudah banyak berkurang karena adanya peningkatan kewaspadaan terhadap bahaya dan ancaman yang terjadi terhadap kapal mereka dan peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh kerjasama malsindo. Upaya yang dilakukan oleh para perampok bersenjata yang selama ini tidak lagi direspon sehingga kemungkinan awak kapal memberhentikan kapal mereka sudah jarang bahkan tidak ada lagi ditemukan. (wawancara Mayor Laut Arif Priwadi 7/1/2016)

### *Kerjasama MALSINDO dalam Pandangan Neoliberalisme*

Neoliberalisme menurut Lamy (1994) menjadi pandangan yang akan digunakan oleh penulis dalam melihat secara lebih rinci mengenai kerjasama Malsindo. Asumsi inilah yang kemudian dipakai untuk dapat menganalisis perilaku ketiga negara seperti dalam hal mengambil keputusan, upaya yang dilakukan serta apa saja yang selama perkembangannya menjadi kendala dan juga keberhasilan yang telah dicapai.

Asumsi dasar Neoliberalisme menurut Stevan L. Lamy terdiri dari empat dasar asumsi yang di antaranya adalah sebagai berikut :

**Pertama**, Negara sebagai aktor rasional, dalam lingkungan yang kompetitif Neoliberalisme melihat negara harus mampu memaksimalkan kewenangan melalui kerjasama.

Berdirinya sebuah negara tentunya akan membutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya agar setiap kewenangan yang diberikan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya demi mewujudkan kepentingan negaranya. Salah satu kepentingan negara yang paling penting adalah keamanan negaranya sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengamankan wilayahnya dengan menetapkan aturan-aturan hukum yang akan diberlakukan dan dijalankan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Sama halnya dengan Indonesia, Malaysia dan Singapura yang juga memiliki aturan masing-masing dalam wilayahnya sesuai dengan peraturan dalam negerinya.

Sejak peristiwa 11 September 2001, negara-negara di dunia menjadi lebih fokus untuk meningkatkan keamanan negaranya tidak terkecuali dengan kawasan Asia Tenggara yang sering ditemukan kasus-kasus perampokan bersenjata. Terkait dengan keamanan di Selat Malaka yang baru mendapat pengamanan yang lebih serius sejak adanya 11 September 2001 menyebabkan terbentuknya Kerjasama Malsindo. Ketiga negara ini menggabungkan diri kedalam satu wadah kerjasama yang di dalamnya terdapat program kerja yang akan dilakukan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Pertama dalam hal patroli laut, setiap negara memiliki tempat pantauan masing-masing yang dilakukan setiap hari namun untuk mengoperasikan kapal patroli untuk berpatroli di wilayah Selat Malaka sebanyak dua kali dalam seminggu. Kegiatan ini bukan tanpa latihan karena latihan akan terus dilakukan masing-masing negara dalam satu wilayah antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Meskipun lebih sering dilakukan di perairan Indonesia. (wawancara Mayor Laut Arif Priwadi 7/1/2016)

Patroli udara juga dilakukan dalam Kerjasama Malsindo untuk menambah jarak pantauan yang digunakan sebagai langkah cepat menemukan para perampok bersenjata. Selain itu, pertukaran informasi di antara negara anggota juga menjadi hal yang penting dalam pengamanan Selat Malaka yang lebih cepat.

**Kedua**, kerjasama tetap menjadi modal utama artinya, dalam sebuah kerjasama memiliki tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama melalui berbagai macam program kerja yang telah disepakati. Dalam hal ini, Indonesia, Malaysia dan Singapura sepakat mencapai tujuan bersama di wilayah Selat Malaka melalui Kerjasama.

Kerjasama menjadi pilihan yang paling tepat bagi Indonesia, Malaysia dan Singapura karena dengan adanya kerjasama, ketiga negara ini bisa bersama-sama melakukan pengamanan laut di wilayah Selat Malaka. Jika pengamanan dilakukan bersama-sama maka pengamanan di Selat Malaka bisa semakin ketat dan pengeluaran yang dibutuhkan juga tidak sebesar pengeluaran jika dilakukan sendiri.

**Ketiga**, terjadinya kecurangan dalam kerjasama merupakan salah satu hambatan yang bisa saja terjadi saat aktor saling bekerja sama satu sama lain. Kecurangan dalam sebuah kerjasama memang mungkin saja terjadi mengingat kerjasama terdiri dari perbedaan kepentingan yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kepentingannya. Kecurangan yang terjadi bisa menjadi hambatan apabila terdapat salah satu pihak yang tidak menerima adanya kecurangan tentunya hal itu menjadi masalah yang baru.

Dalam kerjasama Malsindo, hampir bisa dikatakan tidak terdapat kecurangan karena ketiga negara tetap berada pada posisinya masing-masing dan tidak sampai masuk ke dalam wilayahnya negara lain. Hal inilah yang sangat dihargai oleh ketiga negara sehingga kecurangan di dalam Kerjasama Malsindo bisa diminimalisir.

**Keempat**, Neoliberalisme mengutamakan adanya kerjasama antar aktor dalam hubungan internasional. Namun, tidak mungkin jika kerjasama dapat menimbulkan permasalahan karena negara memberikan loyalitas dan sumber dayanya kepada institusi jika dan hanya jika institusi memberikan keuntungan mutualisme dan menyediakan tempat yang lebih untuk mempertahankan kepentingan internasionalnya.

Kerjasama Malsindo terdiri dari lembaga-lembaga pertahanan dan keamanan negara sebagai perwakilan masing-masing negara anggota. Indonesia diwakili oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut ( TNI AL) khususnya bagian barat yang dibantu oleh badan-badan keamanan lainnya seperti Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), dan Mabes Polri. Malaysia diwakili oleh Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM), sementara Singapura diwakili *Royal Navy of Singapore* (RNS). Lembaga-lembaga inilah yang akan menjalankan program kerja dari Kerjasama Malsindo untuk mendapatkan tujuan dan keuntungan bersama yaitu keamanan di Selat Malaka yang tentunya juga akan aman bagi kepentingan nasionalnya.

Berdasarkan keseluruhan asumsi Neoliberalisme menurut Stevan L. Lamy maka penulis dapat menyimpulkan bahwa negara menjadi aktor yang sangat penting. Alasannya adalah sebagai aktor yang rasional, negara tentu akan bertindak sesuai dengan kepentingan nasionalnya dan hal-hal yang dapat membantu negara untuk mencapai tujuan dari kepentingannya akan dilakukan, termasuk bersedia melakukan kerjasama multilateral.

Kaitannya dalam penulisan ini adalah peristiwa 11 September 2001 memang memiliki pengaruh yang besar terhadap keamanan negara Amerika tetapi berpengaruh juga pada keamanan di luar wilayah seperti Selat Malaka. Keamanan Selat Malaka yang sebelum peristiwa 11 September 2001 tidak menjadi persoalan yang serius kini malah menjadi fokus dari Indonesia, Malaysia dan Singapura. Akibatnya, pengamanan yang lebih serius melalui Kerjasama Malsindo baru secara resmi terbentuk pada tahun 2004.

Kerjasama Malsindo di Selat Malaka menangani perampokan bersenjata tahun 2004-2013 bisa dikatakan berhasil karena perampokan bersenjata yang terjadi dalam kurun waktu tersebut menunjukkan data yang cenderung menurun setiap tahunnya. Keberhasilan kerjasama Malsindo itu sendiri disebabkan oleh faktor di bawah ini:

#### *Kepedulian Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam Kerjasama Malsindo*

Kepedulian merupakan hal yang penting bagi setiap negara anggota kerjasama, sama halnya dengan Indonesia, Malaysia dan Singapura yang memiliki kepedulian terhadap ancaman perampokan bersenjata di Selat Malaka. Kepedulian ini menjadi langkah awal yang dilakukan ketiga negara untuk bersama-sama mewujudkan kondisi Selat Malaka yang aman dari segala macam bentuk pelanggaran hukum.

Setelah kerjasama dilakukan, ketiga negara ini juga tetap memiliki rasa kepedulian yang sama. Bukti nyata kepedulian yang dilakukan adalah dengan mengadakan latihan bersama antar negara anggota untuk memperkuat posisinya sehingga pengamanan yang dilakukan di Selat Malaka dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah dilakukan selama latihan. Selain itu penempatan kapal-kapal patroli laut dan pesawat udara melalui pantauan wilayah masing-masing juga menjadi wujud pengamanan Kerjasama Malsindo di Selat Malaka.

#### *Kepatuhan Indonesia, Malaysia dan Singapura terhadap Program Kerja Kerjasama Malsindo*

Program Kerja yang dihasilkan oleh Kerjasama Malsindo memang telah disepakati oleh ketiga negara tetapi jika tanpa kepatuhan dari masing-masing negara anggota program kerja ini tidak bisa jalan sebagaimana mestinya. Indonesia, Malaysia dan Singapura terus melakukan pembaruan pada alutsista negaranya agar dapat dioperasikan di wilayah Selat Malaka. Hal ini menjadi bukti nyata kepatuhan dari Indonesia, Malaysia dan Singapura terhadap program kerja yang telah mereka sepakati sejak awal terbentuknya Kerjasama Malsindo.

Adanya kepedulian dan kepatuhan dari masing-masing negara anggota terhadap apa yang telah disepakati mendapatkan pencapaian yang sangat baik. Hal ini terbukti sejak adanya Kerjasama Malsindo kondisi Selat Malaka semakin aman dari gangguan perampokan bersenjata sehingga kapal-kapal yang akan melintas atau sedang berlabuh di Selat Malaka

bisa dengan aman melewatinya. Namun demikian, para awak kapal harus tetap memiliki kewaspadaan yang tinggi.

## PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kerjasama Malsindo dilatarbelakangi oleh kepentingan masing-masing negara anggota di Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dilihat dari kepentingan ekonomi dan pertahanan keamanan, ketiga negara memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kepentingannya di selat malaka.

Perbedaan pandangan ketiga negara ini menjadi kendala yang menyebabkan belum terbentuknya Kerjasama Malsindo sehingga ketiga negara melakukan pertemuan untuk menyatukan pandangan dan tujuan yang pada akhirnya baru secara resmi terbentuk pada tahun 2004. Faktor pemicu formalisasi kerjasama yang baru dilakukan pada tahun 2004 tersebut disebabkan oleh adanya peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat berpengaruh terhadap kondisi keamanan di Selat Malaka yang dikhawatirkan akan menyerang kapal-kapal yang melewati jalur Selat Malaka.

Selanjutnya, Kerjasama Malsindo dalam menangani segala bentuk aktifitas perampokan bersenjata yang terjadi di Selat Malaka menghasilkan beberapa upaya seperti **Malacca Strait Sea Patrol (MSSP)** yang diluncurkan pada 20 Juli 2004 dan dalam pelaksanaan patrolinya, negara Indonesia, Malaysia dan Singapura melakukan patroli terkoordinasi dengan saling memfasilitasi berbagi informasi antara kapal dan *Monitoring and Action Agency (MAA)*. **Eyes In The Sky (EIS)** merupakan patroli yang dilakukan melalui pantauan udara sehingga patroli dilakukan dengan menggunakan pesawat udara yang meneghlilingi wilayah pengamanan Selat Malaka. **MSP Intelligence Exchange Group (MSP-IS)** dibentuk pada tahun 2006 oleh Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand sebagai salah satu upaya untuk mendukung patroli laut dan udara melalui Patroli Sistem Informasi Selat Malaka yang digunakan dengan mengoptimalkan aset udara dan laut di tempat kejadian untuk menyampaikan informasi dari insiden yang sedang berlangsung dan untuk semua pemantauan yang dilakukan setiap waktu.

## Referensi

- Defence Minister's of Singapore Government*. 2008. *Milestones of Malacca Strait Patrols*  
[http://www.mindef.gov.sg/imindef/press\\_room/official\\_releases/nr/2008/mar/28mar08\\_nr/28mar08\\_fs.html#.VsUGNrR97Mw](http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2008/mar/28mar08_nr/28mar08_fs.html#.VsUGNrR97Mw) diakses pada 28 Mei 2015 pukul 22.03 WIB
- Defence Minister's of Singapore Government*. 2006. *Launch of Eyes in the Sky (EiS) Initiative* dalam  
[http://www.mindef.gov.sg/imindef/press\\_room/official\\_releases/nr/2005/sep/13sep05\\_nr.html#.VsUZRR9](http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2005/sep/13sep05_nr.html#.VsUZRR9)
- Djalal, Haslim. "Persoalan Selat Malaka dan Singapura".  
[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=22](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22)
- Fitriyadi, Fajar., Abubakar Eby Hara., & Supriyadi. *Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Keamanan di Selat Malaka*. Universitas Jember. Diunduh  
<http://dspace.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/71596/Fajar%20Fitriyadi.pdf?sequence=1> diakses pada 26 Maret 2016 pukul 13.02 WIB
- Hazmi, Mohd. 2012. *Balancing Shipping and the protection of the marine environment of straits used for international navigation: a study of the straits of Malacca and Singapore*. Tesis. Universitas Wollongong dalam  
<http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=4513&context=theses> diakses pada 25 Maret 2015 pukul 10.03 WIB
- Ho, Joshua dan Sam Bateman. 2013. *Maritime Challenges and Priorities in Asia: Implications for Regional Security*. Routledge: London dan New York. Hal. 136
- Lamy, Steven L., 2001. "Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and Neo-liberalism", dalam John Baylis & Steve Smith (eds.) *The Globalization of World Politics* (2nd eds.). New York: Oxford University Press, pp. 182-199

Meganingratna, Andi., (2012). Kerjasama Keamanan Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam Menciptakan Keamanan Jalur Pelayaran di Selat Malaka Pasca Peristiwa 11 September 2001-2010. Tesis. Universitas Indonesia.

TNI AL.2012. Guspurlaarmabar Gelar Operasi MSSP di Perairan Selat Malaka. diunduh <http://www.tnial.mil.id/tabid/79/articleType/ArticleView/articleId/8979/Default.aspx> diakses 27 maret 2016 pukul 17.34 WIB